

**KAJIAN PEMBANGUNAN KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU BERBASIS KELAUTAN DAN PERIKANAN**
(*The Study of Development of Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Based
on Marine and Fisheries*)

Oleh:

Herie Saksono¹⁾, Daniel R. Monintja²⁾, Soepanto S.³⁾, Muhyono S. Baskoro²⁾

Diterima 30 Juni 2007, Disetujui 31 Juli 2007

ABSTRACT

Indonesia has 440 regencies/cities which 279 among them are the region that belong to sea/coastal based on fisheries. Mmt of their potentiut source is from marine resources both marine biological diversity or not. The aim of this research is a model for regency/city based on fisheries industry know HIP effect and as far as the effect's some components which interact in the establishment. The research is held on Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu DKI Jakarta Province. The analysis and model development is done by Structural Equation Modelling (SEM). Based on the result of analysis is founded important several components that are reacted and correlated positive significantly in the developing of Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu such as between implementation of central government authority and regional government authority with the job fisheries also the establishment of job fisheries. This condition gives double effect of the goal of fisheries development and the highly society welfare on the Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu oriented by developing regency based on fisheries industry. Through this study, hope the government of Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu could renew several development policies as soon as possible to be more oriented in rising sea resource based on fisheries industry mainly on the urea as conservations is synchronized and harmonized between regional development and regional function. Besides that fishery businessman in their establishment of fishery industry, can formulate the ideal model to develop their business planning with responsibility of implementation the function and care in using.

Keywords: regional development, marine and fisheries, prosperity.

ABSTRAK

Indonesia yang memiliki 440 Kabupaten/kota, dimana 279 di antaranya memiliki wilayah laut, merupakan wilayah pembangunan berbasis perikanan. Pada wilayah ini sebagian besar potensinya berasal dari sumber daya laut baik

1) Kepala Tata Usaha Pimpinan Departemen Dalam Negeri, Jakarta Email: tupim2007@yahoo.com
2) Staf Pengajar Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan FPJK-IPB
3) Guru Besar Universitas Brawijaya Surabaya (Direksi PT. Usaha Mina Toni.)

hayati maupun non-hayati. Penelitian ini bertujuan merancang model pembangunan bagi kabupaten/kota yang berbasis industri perikanan dan untuk mengetahui adanya pengaruh (*effect*) serta sejauhmana tingkat pengaruh dari berbagai komponen yang berinteraksi dalam upaya pembangunannya. Lokasi penelitian adalah 2 (dua) Kecamatan yang terletak di Gugus Kepulauan Seribu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta. Analisis dan pengembangan model dilakukan melalui *Structural Equation Modelling (SEM)*. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan beberapa komponen utama yang saling berinteraksi dan berkorelasi secara signifikan positif dalam pembangunan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, yaitu : antara implementasi kewenangan pemerintah dan kewenangan pemerintah daerah dengan lingkup usaha perikanan maupun terhadap kegiatan usaha perikanan yang berkembang (kegiatan perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan pengolahan hasil perikanan) Keadaan ini memberikan efek ganda terhadap tujuan pembangunan perikanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang memiliki orientasi pembangunan wilayah berbasis industri perikanan. Melalui studi ini, diharapkan agar Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dapat segera mengkaji kembali berbagai kebijakan pembangunannya agar lebih berorientasi pada pemantaatan potensi laut yang berbasis industri perikanan, terutama pada wilayah yang juga berfungsi sebagai kawasan konservasi, sehingga terwujud sinkronisasi dan harmonisasi antara kegiatan pembangunan wilayah dengan terjaminnya kelestarian fungsi lindung wilayah. Selain itu, bagi pelaku bisnis perikanan dalam pengembangan kegiatan industri perikanan agar dapat merumuskan model ideal untuk pengembangan rencana bisnisnya secara bertanggung jawab baik dalam penerapan fungsi lindung, dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemanfaatannya. Sehingga pengelolaan wilayah pesisir dan lautan dapat bermanfaat secara optimal dan berkelanjutan, demi peningkatan kesejahteraan masyarakat tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan dan terjaminnya kelangsungan hidup generasi yang akan datang.

Kata Kunci Pembangunan Daerah, Kelautan dan Perikanan, dan Kesejahteraan.

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang baru terbentuk merupakan suatu kawasan Taman Nasional Laut yang berfungsi sebagai kawasan konservasi dengan mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 162/Kpts-II/1995 telah menetapkan wilayah

Kepulauan Seribu menjadi Taman Nasional dengan luas 108.000 ha, yang kemudian pengelolaan Kawasan Taman Nasional Kepulauan Seribu diserahkan kepada Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 185/Kpts-II/1997 tanggal 31 Maret 1997, yang berarti aktivitas pembangunan harus berbasis kepada potensi yang dimiliki wilayah tersebut (potensi kelautan dan perikanan) dan dilaksanakan secara ramah lingkungan dengan tetap mengutamakan kelestarian fungsi kawasan.

Terbentuknya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001, dengan mengacu kepada Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 yang juga sekaligus sebagai obyek pengelolaan membuka peluang upaya pemanfaatan potensi yang tidak memperhatikan aspek-aspek lingkungan dan konservasi mengindikasikan bahwa belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya yang disebabkan oleh adanya tumpang tindih kewenangan antara lembaga yang terlibat (Pusat dan Daerah), pengelolaan yang belum berorientasi kepada ketersediaan dan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan (penangkapan, budidaya, dan pengolahan ramah lingkungan), serta tujuan pembangunan perikanan yang belum terarah dengan baik.

1.2 Masalah Penelitian

Interaksi diantara komponen pembangunan pada kabupaten/kota yang memiliki wilayah pesisir seringkali tidak sinkron, karena lebih berorientasi pada konsep pembangunan daratan. Mencermati kondisi ini, diperlukan suatu model pembangunan yang dapat mengakomodasikan pengembangan kabupaten/kota yang berbasis kelautan dan perikanan sebagai upaya untuk mengatasi kesenjangan pertumbuhan dan kurangnya sinkronnya pembangunan di Indonesia.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan merancang model pembangunan kabupaten berbasis kelautan dan perikanan, dengan tujuan operasional untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh (*effect*) dan tingkat pengaruh dari berbagai komponen yang berinteraksi dalam upaya pembangunan

di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Berbasis Industri Perikanan

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis dalam mengkaji, mengidentifikasi, dan memahami berbagai interaksi kompleks dalam pengelolaan sumberdaya perikanan dan pembangunan secara umum, menjadi masukan bagi Pemerintah dalam perumusan kebijakan pembangunan berbasis perikanan terutama pada wilayah yang juga berfungsi sebagai kawasan konservasi laut; menjadi pedoman bagi pelaku bisnis perikanan dalam mengembangkan kegiatan industri berbasis perikanan, dan menjadi terobosan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama pemodelan interaksi kompleks berbagai sumberdaya yang berinteraksi secara bebas sesuai kondisi nyatanya.

1.4 Teori Pembangunan

Pada awalnya, pendekatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah masih berorientasi sentralistik untuk mengejar pertumbuhan dan kestabilan melalui pendekatan pembangunan sektoral. Kondisi ini berimplikasi pada terabaikannya partisipasi publik yang didasarkan pada karakteristik kewilayahan dan kesinambungan faktor ekologis pada masing-masing daerah. Pendekatan pembangunan yang masih berorientasi pro-daratan mendominasi perencanaan dan pengalokasian anggaran pada setiap pemerintahan daerah. Mencermati kondisi ini, perlu dilakukan reorientasi konsep pembangunan, khususnya pada wilayah yang memiliki pesisir dan laut.

2 METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2006 - April 2007, berlokasi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta.

2.2 Jenis, Sumber, dan Ukuran Sampel Data

Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan di lapangan berkaitan upaya pembangunan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berbasis perikanan. Data sekunder adalah data

pendukung kelengkapan penelitian yang berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Pengelola Taman Nasional taut Kepulauan Seribu, dan instansi lainnya yang terkait. Ukuran sampel data untuk analisis berkisar antara 100 - 200 sampel.

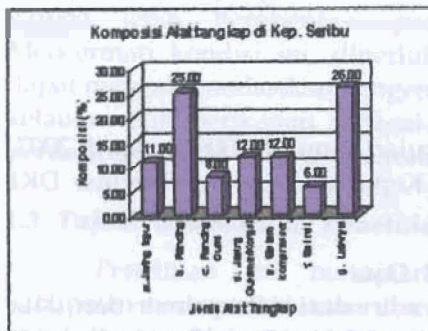
2.3 Analisis Data dan Ruang Lingkup Penelitian

Analisis dalam penelitian ini menggunakan model persamaan struktural atau *structural equation modelling (SEM)*. Memperhatikan luasnya kajian sektor kelautan dan perikanan serta mempertimbangkan berbagai keterbatasan peneliti, maka studi ini difokuskan pada kinerja pembangunan kabupaten yang berbasis industri perikanan.

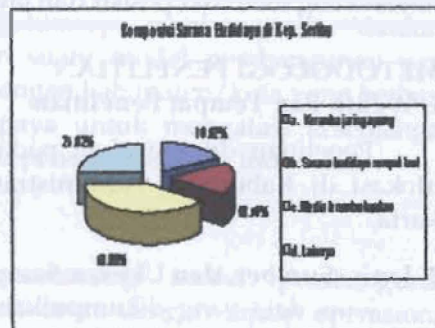
3 HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengembangan Kegiatan Perikanan di Kepulauan Seribu

Kegiatan perikanan diharapkan menjadi basis pembangunan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Pada tahap awal perlu dilakukan pembenahan kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Hal ini karena masyarakat sekitar dominan menjadikan kegiatan penangkapan (45,2%) dan budidaya (23,5%) sebagai pekerjaan utama, dibandingkan dengan kegiatan pengolahan, pemasaran, dan lainnya. Adapun jenis-jenis alat tangkap yang dioperasikan di perairan Kepulauan Seribu adalah jaring tegur, pancing, pancing cumi, jaring kongsu, sistem kompressor, *set net*, dan lain-lain dengan komposisi alat tangkap sebagaimana disajikan pada Gambar 1!



Gambar 1. Komposisi Alat Tangkap di Kepulauan Seribu



Gambar 2. Komposisi Sarana Budidaya di Kepulauan Seribu

Melalui Gambar 1 dijelaskan bahwa pancing merupakan alat tangkap yang dominan digunakan nelayan di perairan Kepulauan Seribu, karena pancing selektif dan ramah lingkungan, serta mendukung fungsi perairan Kepulauan Seribu sebagai kawasan konservasi laut. Selama ini, nelayan mengusahakan alat tangkap yang dibuat sendiri (31%), dibeli kemudian dimodifikasi (55%), dan yang beli jadi (14%). Alat tangkap lainnya sekitar 26% terdiri dari pukat, jaring, insang hanyut, *tratel*, dan lain-lain.

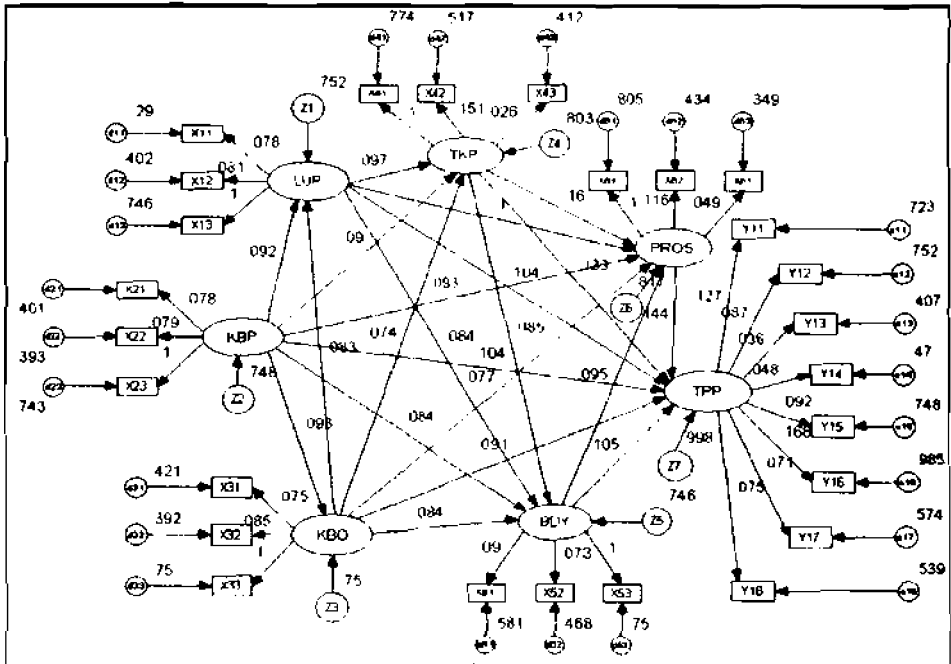
Perikanan budidaya yang banyak berkembang di Kepulauan Seribu adalah budidaya keramba jaring apung, budidaya rumput laut, dan budidaya terumbu karang dengan komposisi sarana disajikan pada Gambar 2. Media terumbu buatan merupakan sarana budidaya yang banyak tersedia di Kepulauan Seribu (40%). Saat ini, media terumbu buatan banyak dikembangkan untuk membudidayakan rumput laut dengan tujuan ekspor dan dijual ke beberapa pasar dalam negeri.

3.2 Kesesuaian Model dengan Kriteria *Goodness-of-Fit*

Kesesuaian model pembangunan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan kriteria *goodness-of-fit index* menggunakan *Structural Equation Modelling*. Berdasarkan hasil analisis SEM, dengan ukuran sampel 157 sesuai pilihan input data *matriks likelihood estimation* mempunyai *degrees of freedom (df)* 188 dan semua kriteria *goodness-of-fit index* dipenuhi oleh model yang dikembangkan. Artinya model pembangunan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berbasis perikanan dinyatakan valid dan dapat digunakan.

3.3 Lingkup Pengembangan Industri Perikanan

Hasil analisis SEM terhadap lingkup usaha perikanan (LUP) disajikan pada Gambar 3. LUP sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksternal LUP (X_{12}). Hal ini ditandai oleh koefisien interaksi atau *total effect* lingkungan eksternal LUP (X_{12}) terhadap LUP yang bernilai 1,00. Pengaruh lingkungan internal LUP (X_{11}) dan lingkungan industri LUP (X_{12}) terhadap LUP cukup rendah yang ditandai oleh koefisien interaksi masing-masing, yakni 0,079 dan 0,081.



Gambar 3. Model pembangunan berbasis industri perikanan

Terkait dengan hasil analisis tersebut, maka LUP yang dikembangkan perlu memperhatikan perkembangan berbagai aspek eksternal yang terjadi di luar, misalnya pasar dan sistem transaksi yang berkembang. Hasil analisis lanjutan menunjukkan bahwa lokasi pemasaran hasil tangkap nelayan yang potensial adalah langsung di Kepulauan Seribu (95%) dan Muara Angke (35%), sedangkan sistem transaksi terbaik adalah pembayaran kontan (83%). Terhadap kewenangan, terbukti bahwa KBP lebih mempengaruhi LUP dibandingkan KBO yang ditandai oleh *total effect* keduanya, yakni 0,092 dan 0,085.

3.4 Interaksi Kewenangan Pernerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

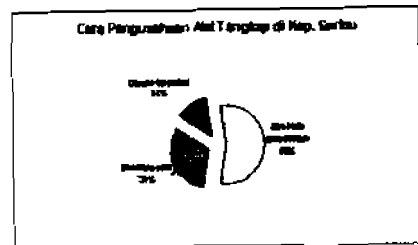
Hasil analisis SEM terhadap KBP berdasarkan Gambar 3 terbukti bahwa pengaruh/*total effect* lingkungan internal KBP (X_{21}), lingkungan industri KBP (X_{22}), dan lingkungan eksternal KBP (X_{23}) berturut-turut

adalah 0,078, 0,079, dan 1,00. Hal ini berarti bahwa implementasi kewenangan pemerintah dalam pembangunan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sangat bergantung pada perkembangan yang terjadi di lingkungan eksternal Pemerintah.

Dalam kaitan tersebut, berbagai perkembangan yang terjadi di luar industri perikanan perlu dicermati dan dipertimbangkan dengan baik oleh pemerintah sebelum menetapkan kebijakan terkait pengembangan industri perikanan, misalnya kebijakan di bidang perpajakan harus memperhatikan pengeluaran lainnya (biaya promosi dan ketersediaan sarana umum pendukung pemasaran).



Gambar 4. Kesulitan transportasi produk perikanan Kepulauan Seribu



Gambar 5. Cara pengusahaan alat tangkap di Kepulauan Seribu

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa sekitar 74% produk perikanan yang dijual masyarakat Kepulauan Seribu tidak melalui promosi. Ketersediaan sarana pemasaran belum mendukung (Gambar 4), dimana masalah utama terletak pada jam pemberangkatan yang jarang (45%). Hal ini mengindikasikan bahwa sebelum mengimplementasikan kebijakan perpajakan, pemerintah terlebih dahulu memhenahi dan memperhatikan ketersediaan sarana pendukung pemasarannya.

Hasil analisis SEM terhadap kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah menunjukkan bahwa pengaruh/*total effect* lingkungan internal KBO (X_{31}), lingkungan industri KBO (X_{32}), dan lingkungan eksternal KBO (X_{33}) berturut-turut adalah 0,075, 0,085, dan 1,00. Hal ini memberi pengertian bahwa implementasi kewenangan oleh pemerintah daerah dalam pembangunan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang berbasis industri perikanan sangat bergantung pada perkembangan yang terjadi di lingkungan eksternal Pemerintah Daerah Kabupaten

Administrasi Kepulauan Seribu. Lingkungan industri KBO merupakan variabel terukur kedua yang cukup mempengaruhi kewenangan pemerintah daerah, sehingga implementasi kewenangan pemerintah daerah harus selalu memperhatikan keluhan-keluhan yang dialami usaha/industri perikanan terutama yang bersifat mikro dan kecil.

3.5 Pengembangan Kegiatan Perikanan Tangkap

Pengembangan kegiatan perikanan tangkap (TKP) dipengaruhi oleh 3 (tiga) variabel terukur dan 3 (tiga) konstruk/variabel laten. Hasil analisis koefisien pengaruh dari variabel terukur pertumbuhan TKP (X_{11}), penyerapan tenaga kerja pada TKP (X_{12}), dan pendapatan pada TKP (X_{13}) terhadap kegiatan TKP berturut-turut adalah 1,00, 0,151, dan 0,026. Berdasarkan analisis ini, maka pertumbuhan usaha menjadi faktor penting dan penentu keberlanjutan kegiatan perikanan tangkap di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Terkait dengan ini, maka berbagai upaya yang menjamin pengembangan kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan perlu didukung. Satu upaya penting yang baik dilakukan adalah memberikan keterampilan desain/modifikasi kepada nelayan skala usaha mikro dan kecil, sehingga nelayan tidak merasa kesulitan bila ingin melakukan pengembangan alat tangkapnya. Modifikasi setelah alat tangkap dibeli merupakan cara pengusahaan alat tangkap yang paling dominan (55%) di Kepulauan Seribu (Gambar 5). Bila hal ini dilakukan dapat menekan biaya pengusahaan alat tangkap bahkan jumlah alat tangkap yang ada dapat berkembang karena nelayan dapat mengusahakannya secara murah.

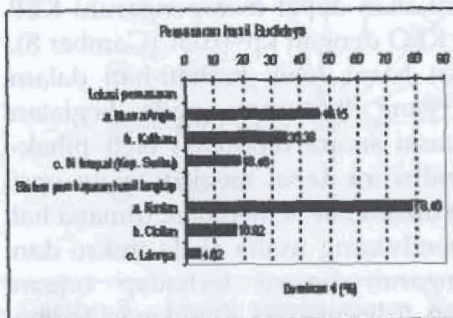
Pada konstruk/variabel laten, LUP merupakan konstruk yang paling berpengaruh terhadap kegiatan perikanan tangkap ($k_p=0,097$). Hal ini berarti bahwa pengembangan TKP perlu berjalan pada LUP yang konsisten, sehingga seluk-beluk usaha diketahui dan jaringan usaha dapat diperluas. Konstruk KBP dan KBO mempunyai koefisien pengaruh masing-masing 0,090 dan 0,074.

3.6 Pengembangan Kegiatan Perikanan Budidaya

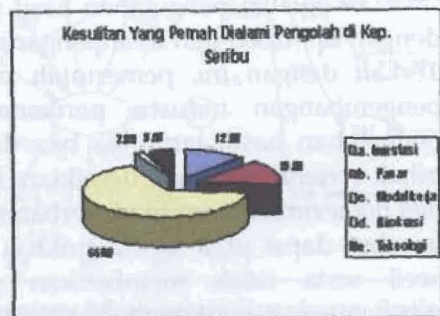
Pengembangan kegiatan perikanan budidaya dipengaruhi oleh 3 (tiga) variabel terukur dan 4 (empat) konstruk/variabel laten. Hasil analisis SEM menunjukkan bahwa pengaruh/total effect variabel terukur

pertumbuhan BDY (X_{51}), penyerapan tenaga kerja pada BDY (X_{52}), dan pendapatan pada BDY (X_{53}) terhadap kegiatan perikanan budidaya (BDY) berturut-turut adalah 0,09, 0,073, dan 1,00. Berdasarkan nilai *total effect* ini, maka pendapatan/*income* menjadi faktor penting dan penentu keberlanjutan kegiatan perikanan budidaya di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Hal ini bisa dipahami karena kegiatan budidaya membutuhkan modal besar selama masa pemeliharaan. Di samping itu, faktor kegagalan juga sering dialami oleh pembudidaya, sehingga pendapatan tinggi menjadi prinsip penting untuk menutupi berbagai kegagalan yang terjadi.

Arahan model ini memberi indikasi bahwa pengembangan kegiatan budidaya perlu diorientasikan pada kegiatan budidaya yang tidak berisiko besar dan/atau memberikan *income* tinggi. Usaha budidaya skala mikro dan kecil perlu memperhatikan hal ini karena skala usaha dan modal menjadi pembatas permanen perkembangannya. Hasil analisis lanjutan menunjukkan bahwa pengembangan budidaya terumbu karang dan keramba jaring apung ikan kerapu dapat menjadi alternatif pengembangan usaha budidaya skala mikro dan kecil di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Di sisi lain, sistem pemasaran yang lebih menjamin *income* adalah sistem pemasaran langsung ke lokasi pasar di Muara Angke dengan cara pembayaran kontan yang banyak dilakukan selama ini (Gambar 6). Sistem pembayaran langsung ke lokasi tersebut dapat menjadi alternative pemasaran hasil bagi usaha budidaya skala menengah dan besar.



Gambar 6. Pemasaran hasil budidaya



Gambar 7. Kesulitan usaha pengolahan

Total effect konstruk/variabel laten LUP, KBP, KBO, dan TKP terhadap kegiatan BDY berturut-turut adalah 0,084, 0,084, 0,084, dan 0,085 (Gambar 3). Keempat konstruk tersebut mempunyai pengaruh yang hampir sama terhadap kegiatan budidaya. Terkait dengan ini, pengembangan kegiatan perikanan budidaya perlu dilakukan dengan memberikan perhatian sama terhadap semua konstruk yang berinteraksi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

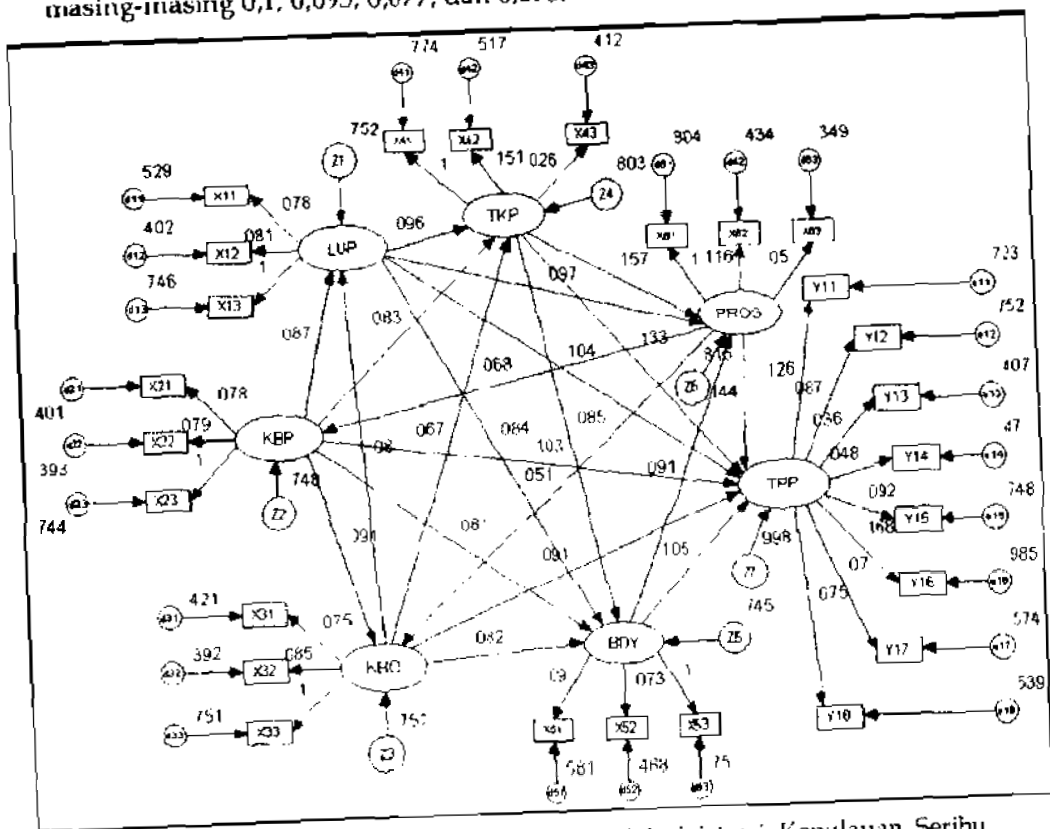
3.7 Pengembangan Kegiatan Pengolahan Hasil Perikanan

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengembangan kegiatan pengolahan hasil perikanan/*processing* (PROS) dipengaruhi oleh 3 (tiga) variabel terukur dan 5 (lima) konstruk/variabel laten. Hasil analisis koefisien pengaruh dari variabel terukur pertumbuhan PROS (X_{61}), penyerapan tenaga kerja pada PRCX (X_{62}), dan pendapatan/*income* pada PROS (X_{63}) terhadap kegiatan PROS berturut-turut adalah 1,00, 0,116, dan 0,05.

Pertumbuhan usaha menjadi faktor penentu keberlanjutan kegiatan pengolahan hasil. Bila pertumbuhan usaha pengolahan diberikan **keleluasaan** sehingga menjadi penciri pembangunan perikanan, maka kegiatan pengolahan hasil perikanan secara relatif akan mempengaruhi kebijakan pemerintah di bidang perikanan di Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu.

Kegiatan pengolahan hasil perikanan dapat mempengaruhi KBP dengan $kp=0,068$ dan mempengaruhi KBO dengan $kp=0,051$ (Gambar 8). Terkait dengan ini, pemerintah pusat harus lebih berhati-hati dalam pengembangan industri perikanan yang bertumpu pada kegiatan pengolahan hasil, terutama bila dikuasai secara monopoli oleh pihak-pihak tertentu. Namun demikian, kondisi ini dapat menjadi suatu opsi bila pemerintah memiliki keterbatasan dalam hal pemodalannya, dimana hal tersebut dapat juga secara sinkron mendukung usaha skala mikro dan kecil serta tidak memberikan pengaruh berarti terhadap tujuan pembangunan perikanan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sesuai strategi pencapaian tujuan pembangunan perikanan.

Untuk mendukung pertumbuhan kegiatan pengolahan, diperlukan bantuan untuk pengembangan kegiatan pengolahan hasil perikanan yang diorientasikan pada pemberian modal kerja bagi usaha pengolahan skala mikro dan kecil di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, karena 66% dari mereka mengalami kesulitan tersebut. Terkait dengan pengaruh konstruk/variabel laten terhadap kegiatan PROS, kegiatan TKP merupakan kegiatan yang paling berpengaruh dengan total effect 0,16. Hal ini karena bahan baku pengolahan sebagian besar berasal dari hasil tangkapan. Total effect/koeffisien pengaruh KBP, KBO, dan BDY masing-masing 0,1, 0,093, 0,077, dan 0,095.



Gambar 8. Model pembangunan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan modifikasi: "industri pengolahan/processing mengintervensi kewenangan pemerintah dan pemda"

3.8 Strategi Pencapaian Tujuan Pembangunan Perikanan

Dalam kaitan dengan pencapaian tujuan pembangunan perikanan (TPP), konstruk yang berpengaruh dominan adalah kegiatan PROS dan kegiatan TKP, dimana masing-masing memiliki koefisien pengaruh 0,144 dan 0,133. Hasil ini dimungkinkan karena pengolahan merupakan penghasil produk paling akhir dan pemicu berkembangnya industri perikanan modern, sedangkan penangkapan merupakan kegiatan utama bidang perikanan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Dalam konteks ini, pembangunan perikanan difokuskan pada kegiatan nelayan dan produk-produk baru berdaya sang tinggi yang dihasilkan pengolah. Kegiatan perikanan budidaya merupakan konstruk ketiga dengan koefisien pengaruh 0,105 terhadap TPP. Hal ini mengindikasikan bahwa budidaya menjadi penopang alternatif bila kegiatan JKP tidak memungkinkan lagi untuk dikembangkan dalam menopang industri perikanan.

Di sisi lain, LUP mempengaruhi pencapaian TPP dengan koefisien pengaruh 0,104. LUP yang ditetapkan dan kemudian diimplementasikan menjadi rambu-rambu penting dalam pencapaian TPP secara maksimal. Implementasi model pembangunan berbasis perikanan perlu menjadikan LUP sebagai landasan berbagai pembangunan dan pengembangan yang dilakukan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Secara khusus, KBP dan hBO mempunyai koefisien pengaruh terhadap TPP masing-masing 0,104, dan 0,091. Pengaruh konstruk ini juga perlu diperhatikan dalam pembangunan perikanan, sehingga interaksi yang ada tetap harmonis dan saling mendukung.

Dalam kaitan dengan 8 (delapan) variabel terukur pencapaian TPP, hasil analisis menunjukkan bahwa daya sang industri (Y11), pasar ekspor (Y12), pertumbuhan (Y13), pendapatan asli daerah (Y14), kontribusi ekonomi (Y15), dukungan ekologi (Y16), dukungan sosial (Y17), dan faktor eksternalitas pembangunan (Y18) mempunyai koefisien pengaruh terhadap pencapaian TPP berturut-turut 0,127, 0,087, 0,036, 0,048, 0,092, 0,168, 0,071, dan 0,075. Dalam konteks ini, ekologi menjadi tolak ukur utama yang perlu dicapai dari pembangunan berbasis perikanan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Kondisi ini merupakan prasyarat menginggal Kepulauan Seribu merupakan suatu kawasan dengan status sebagai Taman Nasional Laut.

4 KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Lingkup usaha perikanan, implementasi kewenangan bagi pemerintah pusat, dan implementasi kewenangan bagi pemerintah daerah otonom dalam pembangunan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang berbasis perikanan dominan dipengaruhi oleh lingkungan eksternalnya. Terkait dengan ini, maka pada tataran kebijakan, pembangunan perikanan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu perlu lebih memperhatikan berbagai kondisi eksternal yang ada. Kegiatan perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan pengolahan hasil perikanan masing-masing dominan dipengaruhi variabel terukur oleh pertumbuhan TKP ($k_p=1,00$), pendapatan BDY ($k_p=1,00$), dan pertumbuhan PROS ($k_p=1,00$). Secara khusus, pembangunan perikanan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu perlu lebih memperhatikan hal-hal teknis yang dapat mempertahankan keberlanjutan industri perikanan.

Bila dikaitkan dengan modifikasi model yang dilakukan, maka modifikasi tersebut tidak merubah koefisien pengaruh 8 (delapan) variabel terukur terhadap pencapaian tujuan pembangunan perikanan. Perubahan hanya terjadi pada interaksi diantara konstruk/variabel laten yang ada. Dengan demikian, maka modifikasi model dalam bentuk kegiatan pengolahan yang berkembang leluasa mengintervensi kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan pemerintah daerah dapat menjadi alternatif pembangunan Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu berbasis industri perikanan.

4.2 Saran

Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu segera mengkaji kembali kebijakan pembangunannya agar berorientasi pada pemanfaatan potensi laut berbasis industri perikanan terutama pada kawasan konservasi, sehingga terwujud sinkronisasi dan harmonisasi antara kegiatan pembangunan dengan terjaminnya kelestarian fungsi lindung wilayah dan kesejahteraan masyarakat

Bagi pelaku bisnis perikanan wajib merumuskan model ideal untuk pengembangan rencana bisnisnya secara bertanggung jawab, sehingga diperlukan penelitian lanjutan yang mengukur komparasi nilai ekonomi dari kinerja industri perikanan terhadap total pendapatan dari sektor perikanan pada kabupaten pesisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo., 2006, "Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan", Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Jakarta.
- Amanah, Siti., Basita G. Sugihen, Sumardjo, Pang S. Asngari, dan Djoko Susanto., 2006, "Pengembangan Masyarakat Pesisir dalam mengelola Sumber Daya Pesisir dan Laut: Kasus di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali", dalam "Forum Pascasarjana, Volume 29, Nomor 1, Januari 2006, hal. 25-35", Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Amien, Mappadjanji A., 2000, "Pembangunan Daerah dari Perspektif Kemandirian Lokal", dalam "ANALISIS, Tahun 1, Nomor 3, Oktober 2000, hal. 1-17", www.pasca.unhas.net/jurnal_pdf/vol_1_3/ANCI-1.pdf
- Bacon, L. D. 1997. Using AMOS for Structural Equation Modeling in Market Research. Lynd Bacon & Associates, SPSS Inc.
- Bambang Murdiyanto., 2003, "Menumbuhkan Komitmen dan Kerjasama *Stakeholder* dalam Pengelolaan Sumberdaya Laut Wilayah Pantura Jawa Tengah", dalam "Buletin PSP, Volume XII Nomor 2, Oktober 2003, hal. 65-79", Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Budiono Sri Handoko., 2001, "Pemikiran Pendekatan Pembangunan di Awal Millenium: Penekanan pada Kualitas Pertumbuhan", dalam "Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Ekonomi Negara Berkembang, Volume 6 Nomor 2, Tahun 2001, hal. 123-132", Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

- Czepiel, J.A. 1992. *Competitive Marketing Strategy*. New Jersey, Printice Hall Inc.
- Fauzi, A. 2005. "Kebijakan Perikanan dan Kelautan". PT. Gramedia Pustaka Ulama. Jakarta.
- Ferdinand, A. 2002. "Structural Equation Modeling dalam Penelitian Manajemen". Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hanafiah dan Saefuddin, A. M. 1986. *Tata Niaga Perikanan*. UI Press. Jakarta.
- Hayduk, L. A. 1987. "Structural Equation Modeling with LISREL". Baltimor and London. John Hopkins University Press.
- Kesteven, G. L. 1973. "Manual of Fisheries Science. Part 1. An Introduction of Fisheries Science". FAO Fisheries Technical Paper. No.118. Rome. Pg. 43
- Hettne, Bjorn., 2000. "Reorientasi Teori Pembangunan" dalam "Wacana Jurnal Ilmu Sosial Transformatif, Edisi 5, Tahun 11, 2000, hal. 73-100". Insisi Press, Yogyakarta.
- Monintja, D. 2001. "Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir dalam Bidang Perikanan Tangkap". Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Nikijulw, V. P. H. 2002. "Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan". PVR. Jakarta.
- Pieris, John., 2001. "Pengembangan Sumber Daya Kelautan". Cetakan Pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Basri, Yuswar Zainul. 2007. "Bunga Rampai Pembangunan Ekonomi Pesisir", Penerbit Irisakti, Jakarta.